



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN  
2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

- Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR

SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan dalam sub kegiatan, yang meliputi:

- a. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi;
  - c. fasilitasi kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;
  - d. koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi;
  - e. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;
  - f. koordinasi pengendalian dan pelaporan administrasi keuangan dan aset pemerintah di wilayah provinsi;
  - g. pengendalian urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan
  - h. fasilitasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kabupaten/kota.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran alokasi anggaran pendanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi berdasarkan :
  - a. Jumlah Kabupaten/Kota;
  - b. Standar Biaya Umum; dan
  - c. Aksesibilitas.
- (2) Besaran alokasi pendanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi tahun anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran Peraturan

Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas 5 (lima) pejabat eselon III yang berasal dari lingkungan:

- a. Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum;
  - b. Biro yang membidangi administrasi pembangunan;
  - c. Biro yang membidangi administrasi keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. Biro yang membidangi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Biro yang membidangi administrasi pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertanggungjawab terhadap sub kegiatan:
  - a. fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi;
  - c. fasilitasi kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;
  - d. pengendalian urusan pemerintahan kabupaten/kota di wilayah provinsi.
- (2) Biro yang membidangi administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi.
- (3) Biro yang membidangi keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan koordinasi pengendalian dan pelaporan administrasi keuangan dan aset pemerintah di wilayah provinsi;
- (4) Biro yang membidangi peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan fasilitasi peraturan perundang-undangan; dan

(5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, bertanggung jawab terhadap sub kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah.

5. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Uraian pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012.

7. Ketentuan BAB VI BARANG HASIL PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2012

MENTERI DALAM NEGERI,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 175  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 18 TAHUN 2012  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

ALOKASI PENDANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	PROVINSI	PENILAIAN 2012
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	7.270.000.000
2.	SUMATERA UTARA	9.830.000.000
3.	SUMATERA BARAT	7.290.000.000
4.	RIAU	6.470.000.000
5.	JAMBI	5.055.000.000
6.	SUMATERA SELATAN	6.550.000.000
7.	BENGKULU	7.165.000.000
8.	LAMPUNG	7.385.000.000
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5.635.000.000
10.	KEPULAUAN RIAU	6.305.000.000
11.	DKI JAKARTA	4.955.000.000
12.	JAWA BARAT	8.185.000.000
13.	JAWA TENGAH	9.625.000.000
14.	DI YOGYAKARTA	4.485.000.000
15.	JAWA TIMUR	9.950.000.000
16.	BANTEN	4.650.000.000
17.	BALI	8.360.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	6.845.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	8.485.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	6.510.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	5.795.000.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	6.020.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	7.555.000.000
24.	SULAWESI UTARA	8.505.000.000
25.	SULAWESI TENGAH	6.335.000.000
26.	SULAWESI SELATAN	8.210.000.000
27.	SULAWESI TENGGARA	6.595.000.000
28.	GORONTALO	5.740.000.000
29.	SULAWESI BARAT	6.255.000.000
30.	MALUKU	7.940.000.000
31.	MALUKU UTARA	7.375.000.000
32.	PAPUA	12.810.000.000
33.	PAPUA BARAT	8.445.000.000
	TOTAL	238.585.000.000

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI